

Garam Mau Diimpor Lagi?

JAKARTA — Pemerintah kemungkinan besar kembali mengimpor garam 500.000 ton. Jika direalisasikan, ini merupakan impor kedua kalinya hanya dalam kurun waktu 2 bulan terakhir.

David E. Issetiabudi, Rayful Mudassir,
& Sri Mas Sari
redaksi@bisnis.com

Sumber *Bisnis* mengungkapkan adanya rencana impor komoditas itu. Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dikabarkan telah membahas rencana impor tersebut pada awal pekan ini.

Adapun, garam impor itu bakal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman (mamin) di dalam negeri.

Pada akhir Januari, Kementerian Perdagangan sebetulnya telah menerbitkan izin impor sebesar 2,37 juta ton untuk 21 perusahaan, dari jumlah kuota maksimal yang ditetapkan sebesar 3,7 juta ton.

Polemik dan perbedaan pendapat sempat mewarnai penetapan kuota impor pada saat itu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekomendasikan impor garam industri hanya sebesar 2,17 juta ton, setelah melihat kondisi stok di lapangan. Namun, Kemenko Perekonomian memutuskan kuota impor sebesar 3,7 juta ton, jauh di atas rekomendasi KKP.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang diminta konfirmasi mengakui adanya pembahasan khusus mengenai impor garam industri bersama Presiden di Istana Bogor, Senin (12/3).

"Salah satunya [soal garam] yang kami bahas. Mengenai jumlahnya, nanti koordinasi dengan Pak Menko [Menko Perekonomian]," tutur Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa

(13/3).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengamini adanya pembahasan impor garam dalam kesempatan koordinasi dengan Presiden dan beberapa menteri di Bogor. "Tanya Menperin saja, walaupun saya tahu soal itu."

Soal jumlah, Pramono irit bicara dan hanya mengangguk kepala. "Segera selesai."

Kepada *Bisnis*, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) mengatakan izin impor garam memang sangat mendesak dikeluarkan guna memenuhi kebutuhan industri mamin.

Sejak pekan lalu, menurut Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman, ada perusahaan yang telah berhenti beroperasi akibat kehabisan pasokan.

Dari kuota impor 3,7 juta ton yang sudah ditetapkan, ujar Adhi, sebetulnya ada 'jatah' 460.000 ton bagi industri mamin.

Jumlah ini lebih kecil dari yang diajukan. "Permintaan industri mamin 550.000 ton. [Hasil] Rapat memberikan keputusan 460.000 ton. Sisanya diharapkan dari dalam negeri. Hanya izin belum direalisasikan [sampai saat ini]."

Jika telah mengantongi izin, garam akan diimpor oleh industri pengolah garam, dan selanjutnya didistribusikan untuk bahan baku industri mamin.

"Kami harapkan pemerintah segera mengeluarkan izin."

Berdasarkan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, rekomendasi impor garam dikeluarkan

Neraca Garam 2018 (Ton)

Rincian 2018

1	Stok Awal	349.505
2	Produksi*	1.500.000
3	Impor	-
4	Ekspor	-
5	Penggunaan	3.983.280
	1) Industri Manufaktur	3.306.819
	a. Aneka Pangan	460.000
	b. Kostik Soda	1.838.239
	c. Farmasi	4.430
	d. Kertas dan Pulp	538.752
	e. Pengasinan Ikan	465.398
	2) Industri Lainnya	362.613
	3) Rumah Tangga	313.848
6	Stok Akhir	-2.133.776

*Catatan:

- Perkiraan produksi garam 2018 sebanyak 1,5 juta ton berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG yang menggambarkan kondisi cuaca 2018 yang kemaraunya lebih baik dari 2017 yang produksinya hanya 1,1 juta ton.
- Data diperoleh dari survei BPS bekerja sama dengan Kemenperin dan KKP.
- Konsumsi garam oleh rumah tangga diperkirakan dari hasil Susenas dan proyeksi jumlah penduduk Indonesia menurut BPS.
- Perkiraan penyusutan garam lokal 15%.

Sumber: KKP 2018

BISNIS/HUSIN PARAPAT

oleh KKP. Rekomendasi ini akan menjadi pertimbangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan izin impor. Sebelumnya, rekomendasi impor garam untuk industri dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan membenarkan ada usulan impor garam bagi industri mamin. Namun, rekomendasi dari KKP tak kunjung turun hingga saat ini. "Kalau sudah ada rekomendasi, baru dapat dikeluarkan izinnya."

Masih menurut sumber *Bisnis*, KKP kemungkinan hanya memberikan rekomendasi 300.000 ton, dan penguasaan impor akan diberikan kepada PT Garam.

Ini dilakukan agar peredaran garam impor terkendali dan tidak merugikan petani.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kewenangan me-

ngeluarkan rekomendasi impor garam seharusnya dikembalikan ke Kemenperin.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan saat ini garam industri mengalami kelangkaan sehingga banyak perusahaan yang menghentikan produksi. "Ini menyangkut sektor industri yang mempunyai nilai ekonomi sebesar Rp1.200 triliun."

Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIGPI) Tony Tanduk mengatakan ada sejumlah perusahaan yang sudah tidak dapat memenuhi permintaan pasar secara penuh karena bahan baku garam menipis.

"Kami mohon kebutuhan bahan baku [garam] segera dipenuhi. Kami juga berkomitmen untuk tetap menyerap garam dari petani."

Di sisi lain, petambak garam meminta pemerintah hati-hati merespons permint-

taan industri mamin untuk mengimpor 500.000 ton garam.

KEJANGGALAN

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Barat Edi Ruswandi keberatan jika permintaan sebanyak itu serta-merta diluluskan pemerintah.

Pertama, persetujuan impor garam 2,37 juta ton yang dikeluarkan Kemendag mengandung kejanggalan. Sebanyak 70.000 ton di antaranya diberikan kepada sebuah perusahaan yang mengaku bergerak di industri pengasinan ikan. Padahal, industri pengasinan ikan bisa menggunakan garam rakyat dengan kandungan natrium klorida (NaCl) 85%.

Di sisi lain, HMPG mencatat masih ada stok garam rakyat 180.000 ton di gudang pengepul di beberapa sentra produksi, seperti Sumenep, Pamekasan, Rembang, Pati, Kendal, Indramayu, dan Cirebon, dengan harga rata-rata Rp2.700 per kg. "Pemerintah harus perhatikan dulu produksi garam di dalam negeri supaya petani tidak jadi penonton."

Kedua, pemerintah harus benar-benar meneliti apakah kebutuhan industri mamin sebanyak jumlah yang diminta, dan perusahaan mana saja yang membutuhkan garam impor.

"Kami belum melihat verifikasi yang dilakukan pemerintah terhadap industri-industri ini. Jangan di atas kertas. Harapan kami sesuai dengan kebutuhan riil, jangan ada *mark up*," ujar Edi.

Penolakan juga diungkapkan oleh Asosiasi Petambak Garam Rakyat Indonesia (APGRI). Menurut dia, dasar persetujuan impor awal tahun ini sebanyak 2,37 juta ton untuk 21 perusahaan tak jelas.

Apalagi, persetujuan dikeluarkan pada 4 Januari 2018 atau jauh sebelum keputusan impor garam 3,7 juta ton untuk industri diambil dalam rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian pada 19 Januari 2018. (Annisa Sulistyio Rini/Maria Y. Benyamin)